

## ANALISIS PENERAPAN IFRS S1 PADA *SUSTAINABILITY REPORTING* PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK TAHUN 2024

Nabila Khairunisa<sup>1)</sup>; Nisianti Komalasari<sup>2)</sup>; Tiftalief Sapta Apriliasti<sup>3)</sup>; Rimi Gusliana Mais<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> [khairunisanabila05@gmail.com](mailto:khairunisanabila05@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

<sup>2)</sup> [nisianti08@gmail.com](mailto:nisianti08@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

<sup>3)</sup> [tiftalief.sapta@gmail.com](mailto:tiftalief.sapta@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

<sup>4)</sup> [rimi\\_gusliana@stei.ac.id](mailto:rimi_gusliana@stei.ac.id), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

### Abstract

*This study analyzes the implementation of IFRS S1 (International Financial Reporting Standards Sustainability Disclosure Standards 1) in the 2024 Sustainability Reporting of PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), with a focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) aspects. IFRS S1, issued by the International Sustainability Standards Board (ISSB) in June 2023, integrates the framework of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), a global initiative that guides companies in disclosing information related to governance, strategy, risk management, as well as metrics and targets in addressing climate-related risks. This study employs a qualitative descriptive approach using a case study method and literature analysis based on DSNG's 2024 sustainability report. The analysis results indicate that DSNG has demonstrated a commitment to sustainability reporting, including disclosures on emissions, natural resource management, and sustainability governance structure. However, there are still shortcomings in the transparency of quantitative data, separate reporting of GHG emissions Scope 1–3, and integration of financial risks from ESG factors. This study is expected to serve as a reference for strengthening sustainability reporting practices in accordance with global standards.*

**Keywords:** IFRS S1; Sustainability reporting; TCFD

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan IFRS S1 (*International Financial Reporting Standards Sustainability Disclosure Standards 1*) pada *Sustainability Reporting* PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) tahun 2024, dengan menekankan aspek ESG (*Environmental, Social, and Governance*). IFRS S1 yang diterbitkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) pada Juni 2023, mengintegrasikan kerangka kerja dari *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), yaitu inisiatif global yang memandu perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target dalam menghadapi risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis literatur dari laporan keberlanjutan DSNG tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa DSNG telah menunjukkan komitmen terhadap pelaporan keberlanjutan, seperti pengungkapan emisi, pengelolaan sumber daya alam, dan struktur tata kelola keberlanjutan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam transparansi data kuantitatif, pelaporan terpisah untuk emisi GRK *Scope 1-3*, serta integrasi risiko keuangan dari ESG. Studi ini diharapkan menjadi referensi dalam penguatan praktik pelaporan keberlanjutan sesuai standar global.

**Kata Kunci:** IFRS S1; Sustainability reporting; TCFD

## PENDAHULUAN

Keberlanjutan telah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Keberlanjutan berarti mempertahankan atau meningkatkan proses, sistem, dan aktivitas penting dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya atau merusak lingkungan (Sun, 2024). Isu apakah perusahaan harus mempertimbangkan penerapan keberlanjutan atau memberikan informasi tentang dampak kegiatan mereka (dampak keberlanjutan) kepada para pemangku kepentingan tidak lagi hanya menjadi bahan diskusi. Sebaliknya, isu-isu ini dan isu-isu serupa telah menjadi bagian integral dari kerangka nilai bagi para pemegang saham dan manajemen perusahaan global maupun lokal (Komala & Murtanto, 2024).

Dalam era yang semakin berkembang dan kompleks, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya tujuan berkelanjutan (*sustainability*) dalam proses bisnisnya. Perusahaan sebagai salah satu penyumbang limbah dan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, perlu menyadari bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya harus



menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Peningkatan perhatian terhadap pengungkapan berkelanjutan melalui tiga aspek utama, yaitu *environmental*, *social* dan *governance* (ESG), membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi berkelanjutan yang berpotensi memengaruhi perkembangan visi dan misi perusahaan di masa depan (Shadra & Hutapea, 2024).

Pada Maret 2022, ISSB merilis *Exposure Draft* IFRS S1 yang mengusulkan standar pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dalam laporan keuangan. Setelah menerima umpan balik, ISSB merevisi proposal tersebut dan secara resmi menerbitkan IFRS S1 pada Juni 2023. Standar ini diperkenalkan melalui acara global di berbagai bursa saham, termasuk Frankfurt, London, dan New York. IFRS S1 mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan mulai 1 Januari 2024, dengan opsi penerapan lebih awal jika disertai dengan IFRS S2 (Team, 2023).

IFRS S1 mengadopsi dan mengintegrasikan rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), yang mewajibkan setiap perusahaan untuk mengungkap informasi tentang tata kelola perusahaan, strategi, pengelolaan risiko, metrik, dan target yang berkaitan dengan keberlanjutan. Sehingga pengungkapan yang sesuai dengan TCFD akan sejalan dengan IFRS S1. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam laporan keberlanjutan perusahaan (ISSB, 2023).

Di Indonesia, praktik pelaporan keberlanjutan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sejak tahun 2003, *sustainability report* masih merupakan bagian dari pelaporan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dipelopori oleh *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR). Sejak berpartisipasi dalam The Paris Agreement pada tahun 2015 lalu, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat penerapan inisiatif yang mendukung kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, yang sering disebut sebagai *Environment, Social, and Governance* (ESG), yang merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Bappenas, 2021). Untuk memenuhi komitmennya, pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan penerapan dan pelaporan aktivitas berkelanjutan tersebut oleh pihak private yakni melalui penerbitan POJK No.51/OJK.03/2017. Dalam pemenuhan komitmen ini pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak dari semua lapisan masyarakat untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai panduan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat umum (Wijaya & Novianto, 2024).

Kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walaupun saat ini sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI), terdapat upaya untuk menyelaraskan praktik pelaporan keberlanjutan dengan standar internasional seperti IFRS S1 (Simorangkir & Shauki, 2024).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealita dan realita dalam praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Di satu sisi, regulasi dan standar seperti IFRS S1 dan GRI telah tersedia untuk menjadi acuan. Namun di sisi lain, penerapan standar tersebut belum sepenuhnya optimal. Banyak perusahaan, terutama di sektor *non-keuangan*, yang masih memandang laporan keberlanjutan sebagai formalitas belaka atau bahkan hanya melakukan pengungkapan secara simbolis (*greenwashing*), tanpa memberikan informasi yang benar-benar berdampak bagi pemangku kepentingan, bukan sebagai alat strategis untuk menciptakan nilai jangka panjang. Beberapa laporan keberlanjutan masih minim integrasi dengan informasi keuangan atau tidak mencerminkan keterkaitan antara risiko keberlanjutan dan kinerja bisnis secara menyeluruh (Dwiyanandi, 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan manajemen isu ESG dapat secara langsung memengaruhi nilai laba dan reputasi perusahaan (PwC, 2023). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa dengan adanya pengungkapan ESG perusahaan dapat membuka peluang yang baik dan merasakan dampak positif. Pada kenyatannya, dalam beberapa tahun terakhir masih banyak kasus yang terjadi pada perusahaan dalam menjalankan usahanya. Pada aspek *environmental*, PT Indofood CBP Idolacto membuang limbah yang diduga mencemari lingkungan di aliran sungai Sindangpalay (Rahayu & Dewi, 2021). Lebih lanjut, pengungkapan dalam laporan keberlanjutan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengenai kinerja keberlanjutan belum secara langsung menghubungkan dampaknya dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sehingga bisa dikatakan bahwa mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan IFRS S1 dan IFRS S2 ke dalam laporan keberlanjutannya (Komala & Murtanto, 2024).

Pada aspek *social*, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk diduga melakukan penyimpangan CSR berupa pelanggaran laporan CSR yang memuat kegiatan penyumbangan dan penyaluran dana konsumen di laporan tahunannya (Ernawati, 2021) Selain itu, pada aspek *governance*, PT Indofood Tbk diduga melakukan pelanggaran etika bisnis berupa pelanggaran hak asasi pekerja, penggunaan bahan-bahan berbahaya hingga eksploitasi pekerja (Lireq et al., 2022 dalam (Shadra & Hutapea, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Simorangkir & Shauki, 2024) pada PT PLN (Persero), Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) telah mulai menyelaraskan ESG Performance Report dengan IFRS S1 dan TCFD Report dengan IFRS S2, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterhubungan informasi *non*-keuangan dengan laporan keuangan serta kesenjangan dalam pemenuhan target transisi iklim global, sehingga evaluasi lebih lanjut terhadap kesiapan dan konsistensi penerapannya menjadi penting. Selain itu, (Komala & Murtanto, 2024) juga menyoroti adanya kesenjangan antara standar pelaporan yang digunakan oleh banyak perusahaan di Indonesia, seperti GRI, dengan tuntutan transparansi dan keterpaduan yang ditetapkan dalam IFRS S1. Lebih lanjut, (Dwiyandi, 2025) menegaskan bahwa penerapan pengungkapan ESG yang sesuai dengan standar IFRS S1 berpotensi meningkatkan nilai perusahaan dimata investor, namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut, khususnya dalam hal penyediaan data kuantitatif dan integrasi antara informasi keberlanjutan dengan kinerja keuangan secara menyeluruh.

IFRS S1 baru efektif berlaku untuk periode pelaporan mulai 1 Januari 2024, sehingga sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan laporan sebelum 2024 yang belum sepenuhnya mengadopsi standar ini. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung membahas IFRS S1 secara umum atau dikaitkan dengan POJK dan GRI, tanpa mengulas secara spesifik aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dengan demikian, masih terdapat *research gap* berupa kurangnya kajian empiris yang secara spesifik menganalisis implementasi IFRS S1 dalam konteks ESG berdasarkan laporan perusahaan setelah standar ini resmi berlaku. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis implementasi IFRS S1 dalam aspek ESG pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) berdasarkan laporan 2024, yang mencakup empat konten inti IFRS S1 dan integrasi kerangka TCFD. Dengan demikian, penelitian ini menjadi lebih relevan secara waktu dan substansi, serta mengisi kekosongan kajian penerapan IFRS S1 dalam praktik ESG di Indonesia

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran awal mengenai sejauh mana IFRS S1 telah diadopsi oleh perusahaan di Indonesia, khususnya oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk sebagai salah satu emiten di sektor agroindustri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang selaras dengan

standar internasional, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur terkait pelaporan keberlanjutan berbasis IFRS S1. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator dalam menyusun kebijakan pelaporan keberlanjutan yang lebih efektif dan relevan .

## KAJIAN PUSTAKA

### **Konsep *Sustainability Reporting* dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*)**

*Sustainability reporting* atau laporan keberlanjutan merupakan proses komunikasi perusahaan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan yang saling terkait.

Istilah ESG atau *Environmental, Social, and Governance* adalah seperangkat standar yang mengacu pada tiga kriteria utama dalam mengukur keberlanjutan. Menurut OECD (2022) dalam (Sofia, 2024), ESG mengacu pada proses mempertimbangkan elemen-elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan risiko sehingga menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan. Terminologi ESG ini sering kali dikaitkan dengan program keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yakni dalam kaitannya dengan pendanaan, investasi, maupun aspek-aspek lainnya yang dapat dijadikan sebagai bentuk pelaporan kepada publik.

Sementara *International Finance Corporation* mendefinisikan ESG sebagai satu set faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam rangka mengelola kegiatan operasinya, oleh investor ketika akan mengambil keputusan investasi, berkaitan dengan risiko, dampak dan kesempatan terkait dengan isu lingkungan, sosial dan tata kelola (IFC, 2021).

OJK juga mengakui bahwa terdapat tiga faktor utama pengukuran dampak keberlanjutan yang mendukung etika dalam pengambilan keputusan investasi, yakni faktor lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*) dan tata kelola (*Governance*) atau ESG. Karena itu OJK telah mengadopsi penilaian atas faktor ESG tersebut sebagai bagian penting dalam menilai implementasi praktik ESG di perusahaan. Karena itu OJK bekerja sama dengan lembaga penilai ESG *Morningstar Sustainalytics* untuk melakukan penilaian atas perusahaan tercatat di BEI (Wijaya & Novianto, 2024).

Terdapat beberapa kriteria yang relevan dalam faktor yang terkait dengan lingkungan atau *environmental*, sosial atau *social*, dan tata kelola atau *governance* (ESG). Faktor Lingkungan, suatu perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya perlu memperhatikan keberlangsungan alam dan menjaga lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti halnya penggunaan sumber daya alam, emisi karbon, efisiensi energi, polusi, dan inisiatif keberlanjutan.

Faktor Sosial, dapat mencakup isu-isu terkait ketenagakerjaan, seperti halnya kesehatan, pendidikan, ketimpangan, serta isu-isu sosial yang lebih luas seperti hak asasi manusia, privasi data, dan keterlibatan komunitas. Artinya, kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan perlu untuk mempertimbangkan adanya hubungan yang baik dan setara antara perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak bersangkutan meliputi masyarakat luas, komunitas, serta termasuk pihak karyawan dari perusahaan itu sendiri.

Faktor Tata Kelola, mencakup etika perusahaan seperti penggunaan metode akuntansi yang akurat dan transparan, menjunjung integritas dan kesetaraan dalam memilih pemimpin, serta pemenuhan hak pemegang saham. Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk memastikan keberlangsungan usahanya.

## Pentingnya ESG dalam Laporan Keuangan

### 1. Transparansi

Pengungkapan informasi ESG dalam laporan keuangan meningkatkan transparansi dan membantu pemangku kepentingan memahami risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan.

### 2. Pengambilan Keputusan

Investor dan analis menggunakan informasi ESG untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik, karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan.

### 3. Manajemen Risiko

Dengan memahami dan mengelola risiko ESG, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pasar dan regulasi.

### 4. Reputasi dan Kepercayaan

Perusahaan yang secara aktif mengelola dan melaporkan kinerja ESG cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, yang dapat menarik lebih banyak investor dan pelanggan.

Secara global, ESG Reporting semakin diperkuat dengan regulasi dan standar baru. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) melalui ISSB (*International Sustainability Standards Board*) telah merilis dua standar penting, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2 pada 2023. IFRS S1 mengatur pengungkapan informasi keberlanjutan secara umum, sedangkan IFRS S2 fokus pada isu perubahan iklim (ISSB, 2023).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun Laporan Keberlanjutan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ESG bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.

## **Standar *International Financial Reporting Standards* (IFRS) S1: *Sustainability-related Disclosures***

IFRS S1 adalah standar pelaporan global yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan. Cakupannya luas, yang mengharuskan entitas untuk mengungkapkan semua informasi material yang dapat mempengaruhi arus kas, posisi keuangan, dan biaya modal mereka dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Secara khusus, perusahaan harus memberikan informasi tentang:

### 1. Tata Kelola

Proses tata kelola, pengendalian, dan prosedur yang digunakan entitas untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

### 2. Strategi

Strategi entitas untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

### 3. Manajemen Risiko

Proses yang digunakan entitas untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

### 4. Metrik dan Target

Kinerja entitas dalam kaitannya dengan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, termasuk kemajuan terhadap target yang telah ditetapkan entitas atau yang harus dipenuhi oleh undang-undang atau peraturan.

Standar ini bersifat lintas sektor dan dapat diterapkan oleh semua jenis entitas. IFRS S1 juga dirancang untuk dapat diharmonisasi dengan standar pelaporan lain seperti GRI (*Global Reporting Initiative*) dan TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*). Dalam dokumen resminya, IFRS Foundation (2022) menyatakan bahwa standar ini akan menjadi *baseline* global untuk pelaporan keberlanjutan yang dapat dibandingkan antarnegara dan sektor industri.

IFRS S1 menekankan pentingnya perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan dampak ekonomi dan *non*-ekonomi dari aktivitasnya, termasuk risiko terkait perubahan iklim,

keberlanjutan sumber daya, serta aspek sosial dan tata kelola. ISSB merilis IFRS S1 pada tanggal 26 Juni 2023. Perusahaan diharapkan untuk mengintegrasikan standar tersebut ke dalam kerangka pelaporan keberlanjutan mereka untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan informasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) di seluruh dunia (ISSB, 2023).

### **Teori Legitimasi**

Teori pemangku kepentingan, teori agensi, dan teori legitimasi adalah teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan praktik keberlanjutan. Dalam konteks tujuan penelitian ini, teori legitimasi digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai dampak pengungkapan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Legitimasi adalah ketika tindakan suatu organisasi dilakukan sesuai dengan sistem keyakinan, norma, dan nilai yang diharapkan dan telah ditetapkan oleh lingkungan sosial secara konsisten (Gunawen et al., 2022). (Pedron et al., 2020) menggambarkan teori legitimasi sebagai kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, namun di antara keduanya terdapat informasi yang tidak simetris. Teori legitimasi juga diharapkan dapat menciptakan kesepahaman antara sistem nilai perusahaan dan harapan masyarakat (Gunawen et al., 2022).

### **Peraturan terkait Keberlanjutan di Indonesia**

Mengingat pentingnya kolaborasi antara banyak pihak, pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk memaksakan penerapan aktivitas keberlanjutan ini dengan menerbitkan POJK No. 51/OJK/03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. POJK tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif, maka diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dengan terbitnya peraturan tersebut, maka LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Keuangan Berkelanjutan yang dimaksud adalah merupakan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Atas kegiatan yang dilaksanakan tersebut, LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan, yakni laporan yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Secara lebih spesifik peraturan tersebut melampirkan poin-poin yang harus dipenuhi di dalam Laporan Keberlanjutan pada Lampiran II POJK No.51/OJK.03/2017 (POJK, n.d.).

Selain diterbitkannya POJK No. 51/OJK.03/2017 tersebut, OJK juga kemudian menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Di dalam SE tersebut disebutkan bahwa Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan laporan yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup yang disampaikan kepada publik. Di dalam pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan disebutkan bahwa yang dilaporkan dalam *sustainability report* adalah kegiatan berkelanjutan yang merupakan kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (SEOJK, n.d.).

### **METODE**

Dalam penyusunan artikel ini, peneliti menggunakan pendekatan literatur *review* dengan mencari berbagai sumber data kepustakaan berupa jurnal, dokumen, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Kumpulan literatur tersebut diperoleh dari berbagai *website*

penerbitan jurnal nasional dan internasional. Literatur yang telah terkumpul kemudian dianalisis, didiskusikan, dan dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan berbasis pada kajian akademis yang kuat.

Pendekatan penelitian yang diambil menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (*qualitative method*) studi kasus. Studi kasus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu tanpa upaya untuk menggeneralisasi temuan (Maharani, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan komprehensif atas penerapan IFRS S1 pada *sustainability reporting* di PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Analisis ini juga dapat membantu perusahaan dalam pengembangan praktik terbaik dalam lingkup agroindustri, sejalan dengan standar internasional yang terus berkembang. Selain itu, analisis risiko keberlanjutan juga dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan IFRS S1 pada *sustainability reporting*.



Teknik ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai implikasi kebijakan pelaporan keberlanjutan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta dampaknya dalam industri energi terbarukan. Dengan menggabungkan studi literatur yang luas dan teknik analisis risiko yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) adalah perusahaan agroindustri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX: DSNG). DSNG bergerak di dua lini utama bisnis, yaitu industri kelapa sawit dan produk kayu. Dalam operasional bisnisnya, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hal ini tercermin dalam penerbitan Laporan Keberlanjutan tahunan, yang pada tahun 2024 mencakup strategi, inisiatif, dan kinerja keberlanjutan di seluruh unit bisnis, termasuk entitas anak di Unit Bisnis Kelapa Sawit dan Produk Kayu di pasar utama, yaitu Indonesia (DSNG, 2024). DSNG mulai menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan sejak tahun 2020 dan dipublikasikan setiap tahunnya di situs web perusahaan yang dapat diunduh secara bebas.

**Gambar 1.1 Laporan Keberlanjutan PT Dharma Satya Nusantara Tbk Tahun 2020-2024**

### Laporan Keberlanjutan

	Laporan Keberlanjutan 2024 <a href="#">↓ DOWNLOAD</a> <a href="#">▷ VIDEO ON PROGRESS</a>		Laporan Keberlanjutan 2023 <a href="#">↓ DOWNLOAD</a> <a href="#">▷ WATCH VIDEO</a>		Laporan Keberlanjutan 2022 <a href="#">↓ DOWNLOAD</a> <a href="#">▷ WATCH VIDEO</a>
	Laporan Keberlanjutan 2021 <a href="#">↓ DOWNLOAD</a> <a href="#">📄 APPENDIX</a> <a href="#">^ WATCH</a>		Laporan Keberlanjutan 2020 <a href="#">↓ DOWNLOAD</a> <a href="#">▷ WATCH VIDEO</a>		

Sumber: Website Perusahaan (DSNG, 2024a).

Laporan ini disusun dengan mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan global seperti *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*, POJK No. 51/POJK.03/2017, *Sustainability Policy Transparency Toolkit (SPOTT)*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*. Meskipun IFRS S1 belum secara eksplisit disebutkan, namun sebagian besar prinsipnya telah terintegrasi dalam struktur pelaporan perusahaan (DSNG, 2024).

Laporan Keberlanjutan ini telah ditinjau oleh *Chief Sustainability Officer (CSO)*. Selain itu, sebagai pihak eksternal independen, Moores Rowland Indonesia memberikan jaminan independen dan terbatas atas pengungkapan data tertentu yang ditemukan dalam laporan ini. PT DSNG telah memperoleh pengakuan global karena komitmennya terhadap ESG, pada tahun 2024, peringkat ESG SPOTT meningkat dari posisi 10 pada tahun sebelumnya menjadi posisi 9. Selain itu, perusahaan mencapai peningkatan skor S&P Global ESG menjadi 55. Pencapaian ini menunjukkan upaya konsisten perusahaan untuk menerapkan praktik ESG di seluruh operasinya (DSNG, 2024).

### Evaluasi Penerapan IFRS S1 dalam Aspek ESG di PT DSNG

Berikut adalah hasil analisis penerapan IFRS S1 pada laporan keberlanjutan di PT Dharma Satya Nusantara (DSNG) dalam aspek *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Analisis Penerapan Standar IFRS S1 Pada Sustainability Report PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) Tahun 2024**

Aspek ESG	Indikator Kunci IFRS S1	Penerapan di PT DSNG	Analisis Penerapan
<i>Environmental (Lingkungan)</i>	Pengungkapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ( <i>Scope 1, 2, 3</i> ) dan target pengurangan emisi GRK.	DSNG membuat perhitungan emisi GRK dengan target pengurangan emisi 44% pada 2030. Dan melaporkan bahwa ada penurunan emisi pada tahun 2024, karena dua penangkap metana, pabrik Bio-CNG, dan efisiensi energi.	Belum terdapat pengungkapan terpisah secara detail untuk <i>Scope 1, 2, dan 3</i> .
	Pengelolaan sumber daya alam (air, limbah, energi, dan keanekaragaman hayati).	DSNG melaporkan pengelolaan energi, air, dan limbah, serta upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dengan mendapat 10 PROPER Biru di tingkat nasional, 1 PROPER Biru di tingkat Provinsi, dan 8 PROPER Hijau di tingkat provinsi.	Perlu penekanan pada kuantifikasi target pengurangan penggunaan sumber daya dan efisiensi, karena masih terlalu naratif.

	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Risiko fisik dan transisi yang teridentifikasi akibat perubahan iklim yang memiliki dampak keuangan, sudah dilaporkan dengan menggunakan kerangka TCFD dan menyesuaikan standar GRI.	Untuk penilaian risiko transisi belum mengungkapkan perkiraan jangka waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan, karena dampak keuangan dari risiko ini belum diukur.
<b>Social (Sosial)</b>	Hak Asasi Manusia (HAM) dan praktik ketenagakerjaan	DSNG melaporkan informasi terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kondisi karyawan</li> <li>• perekrutan karyawan</li> <li>• pengembangan karyawan</li> <li>• kesejahteraan karyawan</li> <li>• Hak Asasi Manusia (HAM) dan standar kerja</li> <li>• keberagaman dan inklusi</li> <li>• kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>• Praktik K3</li> </ul>	Sudah sesuai dengan standar IFRS S1, meskipun pengungkapan kebijakan anti-diskriminasi, kebijakan keberlanjutan, kebijakan perlindungan perempuan dan kebijakan perlindungan anak tidak dijelaskan secara detail pada Laporan Keberlanjutan, namun DSNG menyediakan link m tautan untuk membahas masing-masing kebijakan yang mereka terapkan.
	Dampak sosial dan pengembangan masyarakat	DSNG melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan, serta melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pelestarian budaya lokal dengan menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai dengan Kebijakan NDPE mengimplementasikan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	Perlu adanya penjelasan mengenai mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan data kuantitatif terkait <i>outcome</i> program sosial masih terbatas misalnya seperti peningkatan pendapatan masyarakat, atau jumlah penerima manfaat.

<b>Governance (Tata Kelola)</b>	Etika bisnis dan integritas	DSNG memiliki kebijakan terkait anti penyuapan dan korupsi, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Tata kelola perusahaan telah diungkapkan, namun perlu ada informasi lebih detail mengenai independensi dewan komisaris, manajemen risiko ESG, dan mekanisme pengawasan kepatuhan.
	Struktur tata kelola berkelanjutan	DSNG menunjuk <i>Chief Sustainability Officer</i> (CSO) yang bekerja sama dengan Departemen <i>Sustainability</i> , Komite ESG, dan didukung Dewan Penasihat Keberlanjutan (SAB) untuk memastikan integrasi prinsip ESG di seluruh kegiatan perusahaan.	Struktur sudah sesuai dengan standar IFRS S1. Meskipun tidak dijabarkan secara detail pada Laporan Keberlanjutan, namun DSNG menyediakan link tautan untuk membahas struktur tata kelola secara mendalam.
	Pelibatan pemangku kepentingan	DSNG berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang transparan dan inklusif dengan para pemangku kepentingan utama, sesuai dengan Standar Kinerja IFC-PS.	Belum ada informasi tentang kondisi benturan kepentingan yang melibatkan dewan komisaris dan direksi maupun pencegahan konflik kepentingannya.

Sumber: Diolah Sendiri

Evaluasi terhadap Laporan Keberlanjutan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) tahun 2024 menunjukkan komitmen substansial perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai dengan IFRS S1, meskipun masih ada beberapa aspek yang membutuhkan penyempurnaan.

#### Aspek Lingkungan (*Environmental*)

DSNG telah menetapkan target ambisius untuk mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 44% pada tahun 2030, serta berhasil melaporkan penurunan emisi yang dihasilkan dari operasi penangkap metana dan fasilitas Bio-CNG mereka. Namun, transparansi pelaporan emisi masih perlu ditingkatkan, karena klasifikasi *scope* 1, 2, dan 3 tidak diuraikan secara eksplisit dalam laporan. Pada laporan keberlanjutan hanya mengungkapkan bahwa Emisi GRK (Cakupan 1) langsung, Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung, dan Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya. Data emisi GRK yang disajikan hanya untuk Unit Bisnis Kelapa Sawit (menggunakan metode RSPO PalmGHG Calculator. DSNG juga mengungkapkan target reduksi per *scope* pada pilar metrik dan target di kerangka TCFD, tetapi dasar perhitungan dan metodologinya juga tidak dijelaskan secara rinci. Meskipun berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian keanekaragaman hayati telah

diakui, bahkan dengan penghargaan PROPER, laporan perusahaan perlu lebih eksplisit dalam menetapkan target-target kuantitatif. Hal ini penting agar kemajuan dalam indikator keragaman hayati dapat dinilai secara lebih objektif dan terukur.

### **Aspek Sosial (*Social*)**

DSNG telah menguraikan berbagai kebijakan yang mendukung hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan yang etis, termasuk inisiatif pengembangan sumber daya manusia dan program kesehatan kerja. Meskipun rincian kebijakan ini belum sepenuhnya termuat dalam laporan utama, perusahaan telah menyediakan tautan eksternal sebagai referensi tambahan. Program pengembangan masyarakat juga telah dilaksanakan dengan mengedepankan penghormatan terhadap komunitas adat. Akan tetapi, pelaporan dampak dari inisiatif ini masih cenderung bersifat deskriptif, kurang didukung oleh data konkrit mengenai luaran atau manfaat langsung yang diperoleh dari program-program tersebut.

### **Aspek Tata Kelola (*Governance*)**

Struktur keberlanjutan DSNG terlihat solid, ditandai dengan adanya posisi *Chief Sustainability Officer* dan komite pendukung yang relevan. Komitmen terhadap etika bisnis dan kebijakan anti-korupsi telah dikomunikasikan secara internal. Namun, informasi mengenai independensi dewan direksi serta mekanisme pengawasan terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) masih dapat diperluas. Meskipun keterlibatan pemangku kepentingan menjadi prioritas bagi DSNG, laporan belum secara detail menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola potensi konflik kepentingan di tingkat manajemen.

Secara garis besar, DSNG telah berhasil mengimplementasikan sejumlah elemen krusial dari IFRS S1. Namun, terdapat potensi signifikan untuk memperdalam kualitas dan cakupan pelaporan mereka, khususnya dalam penyajian data kuantitatif, keterbukaan terkait risiko, dan integrasi kebijakan-kebijakan penting secara lebih langsung dalam dokumen laporan utama.

Berbeda dengan GRI yang memiliki format indeks, IFRS tidak menetapkan template khusus. Namun, IFRS mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi yang meliputi empat area konten inti: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait risiko dan peluang keberlanjutan. DSNG telah menjabarkan secara detail informasi mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan kesesuaian rekomendasi TCFD, yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam tata kelola perusahaan, strategi bisnis, manajemen risiko, serta pengukuran dan pelaporan kinerja terkait iklim. Informasi ini mencakup konten inti dari standar IFRS S1 yang wajib dilaporkan perusahaan.

Berikut adalah penerapan TCFD pada DSNG yang telah dipublikasikan pada Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 (DSNG, 2024) :

#### ***Tata Kelola***

Direktur Utama DSNG bersama Chief Sustainability Officer (CSO) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan keberlanjutan, seperti manajemen risiko iklim. *Sustainability Advisory Board* (SAB) mengadakan rapat triwulanan untuk mengevaluasi dan memberikan saran tentang masalah keberlanjutan. Dewan Direksi menerima laporan tentang pembahasan SAB untuk dievaluasi dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis dan pengelolaan kinerja perusahaan. DSNG berkomitmen untuk menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi yang inovatif saat menghadapi risiko perubahan iklim. DSNG menunjuk seorang *Climate Action Unit Head* pada tahun 2024, untuk bertanggung jawab atas implementasi program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, empat pertemuan telah dilakukan oleh Komite SAB untuk membahas strategi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis, Dewan Direksi akan meninjau lebih lanjut rekomendasi dari Komite SAB yang relevan.

### **Strategi**

Pada bulan September 2021, DSNG mengambil langkah proaktif dengan memulai evaluasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan menganalisis dampak perubahan iklim, bekerja sama dengan konsultan eksternal. Proses ini, yang menggunakan data tahun 2019 sebagai acuan, yang direncanakan berlangsung setiap tiga tahun sekali. Tujuannya adalah untuk merancang strategi mitigasi iklim yang berbasis ilmiah, yang nantinya akan menjadi landasan bagi perencanaan bisnis dan operasional DSNG di masa depan. Perusahaan berkomitmen untuk terus memperbarui metodenya sejalan dengan standar internasional terbaru, termasuk *Science-Based Target Initiative* (SBTi) dan draf panduan *GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance* (LSRG).

DSNG telah mengidentifikasi berbagai potensi dampak perubahan iklim terhadap operasinya di Indonesia. Pemetaan ini mencakup risiko langsung, risiko transisi, dan peluang yang mungkin muncul. Informasi lebih rinci mengenai lima ancaman fisik utama, strategi penanganannya, serta estimasi anggaran mitigasi dapat ditemukan pada halaman 62-63 Laporan Keberlanjutan perusahaan.

DSNG mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek bisnisnya, dengan mempertimbangkan berbagai skenario iklim dan beradaptasi menuju sistem ekonomi rendah karbon. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengembangan Rencana Aksi Iklim 2030 (CAP). Dalam divisi perkebunan kelapa sawit, terdapat sepuluh program kunci yang perkembangannya dipantau secara rutin hingga ke level dewan direksi. Program-program tersebut meliputi: pengolahan gas metana, konversi energi biogas, pemanfaatan bio-CNG, pengelolaan sampah tanpa ketergantungan TPA, penyimpanan karbon alami, optimalisasi pemupukan, perbaikan kesuburan tanah, pengaturan sistem irigasi kebun, pengolahan air limbah dari pabrik dan permukiman, serta pemanfaatan serangga predator.

### **Manajemen Risiko**

Pada tahun 2022, DSNG secara proaktif melaksanakan Penilaian Dampak Perubahan Iklim (CRA) melalui kolaborasi dengan Asia Biogas dan ERM. Studi komprehensif ini menganalisis berbagai potensi ancaman yang berkaitan dengan iklim, meliputi kebijakan saat ini dan di masa depan, tantangan teknologi, aspek hukum, dinamika pasar, dampak reputasi, serta risiko fisik baik dalam jangka pendek maupun panjang. Analisis tersebut juga mencakup proyeksi dampak untuk periode menengah hingga panjang.

Bersama dengan Komite Audit, DSNG telah berhasil memetakan beragam faktor risiko lingkungan, termasuk yang spesifik terkait perubahan iklim. Selain itu, mereka telah merancang langkah-langkah mitigasi berdasarkan data awal emisi GRK dan hasil penilaian risiko sebelumnya. Untuk memperkuat kerangka manajemen risiko ini, DSNG mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang berpedoman pada standar IFC-PS. ESMS ini diterapkan secara terpadu di seluruh lini bisnis, termasuk pada unit-unit strategis perusahaan (SBU), karena risiko perubahan iklim menjadi salah satu prioritas utama dalam kerangka pengelolaan risiko perusahaan.

### **Metrik dan Target**

Sebagai bagian dari dedikasinya terhadap lingkungan, DSNG telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 44% pada tahun 2030, dengan basis perhitungan dari data tahun 2019. Target ini mencakup pengurangan 70% untuk emisi Lingkup 1, 28% untuk Lingkup 2, dan 23% untuk Lingkup 3. Salah satu inisiatif kunci untuk mencapai sasaran ini adalah pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) *Zero Landfill*, yang diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 1.400 ton CO<sub>2</sub>e. Selain itu, DSNG juga mengoptimalkan Peta Jalan Mandiri Energi dan memanfaatkan limbah organik sebagai bagian integral dari pendekatan holistik pengurangan emisinya.

Tahun 2024 menandai dimulainya Rencana Aksi Iklim (CAP) 2030 DSNG, di mana semua proyek yang termasuk dalam rencana tersebut telah dimulai, baik pada fase perencanaan maupun eksekusi. Salah satu keberhasilan penting di tahun ini adalah proyek percontohan TPST Zero Landfill di Muara Wahau, Kalimantan Timur, dengan kapasitas pengolahan 4 ton per hari. Proyek ini secara resmi diluncurkan pada 26 Juni 2024 dan diperkirakan akan beroperasi penuh pada 19 Desember 2024. Sementara itu, upaya Peta Jalan Mandiri Energi terus ditingkatkan melalui konversi gas metana dari POME menjadi biogas dan bio-CNG di dua lokasi pabrik, dengan potensi pengurangan emisi mencapai 136.991 ton CO<sub>2</sub>e. Pemanfaatan limbah organik seperti tandan kosong dan POME dengan kadar BOD di bawah 5.000 juga menjadi bagian penting dari strategi DSNG untuk mencapai target pengurangan emisi secara berkelanjutan.

DSNG telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan kerangka TCFD pada Laporan Keberlanjutan 2024, mengintegrasikan isu perubahan iklim secara komprehensif dari tata kelola hingga penetapan target emisi. Ini mencerminkan langkah progresif perusahaan menuju keberlanjutan. Namun, untuk memenuhi standar IFRS S1 yang lebih ketat, DSNG perlu meningkatkan transparansi data finansial terkait risiko iklim dan menyajikan pelaporan emisi GRK yang lebih rinci (memisahkan *Scope 1*, *2*, dan *3* secara jelas). Peningkatan ini tidak hanya akan memperkuat kredibilitas laporan, tetapi juga memposisikan DSNG sebagai pemimpin dalam pelaporan keberlanjutan di sektor agribisnis.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) telah menunjukkan komitmen terhadap pelaporan keberlanjutan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan sebagian besar ketentuan IFRS S1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) telah mengungkapkan informasi penting terkait emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam, inisiatif sosial, serta struktur tata kelola berkelanjutan. Perusahaan juga mengadopsi kerangka TCFD dalam pelaporannya, yang selaras dengan IFRS S1.

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar IFRS S1 secara optimal. Kekurangan tersebut meliputi kurangnya transparansi data kuantitatif, serta belum diungkapkannya secara menyeluruh dampak keuangan dari risiko ESG. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dan independensi tata kelola juga belum diuraikan secara mendalam. Dengan demikian, meskipun DSNG berada pada jalur yang benar, penyempurnaan dalam aspek transparansi dan struktur pelaporan masih sangat dibutuhkan.

### **Saran**

#### **1. Peningkatan Transparansi Data Kuantitatif**

DSNG disarankan untuk memperkuat pelaporan dengan menyajikan data kuantitatif yang lebih lengkap dan terukur, khususnya terkait outcome program sosial dan pengelolaan sumber daya alam.

#### **2. Integrasi Risiko ESG ke Dalam Informasi Keuangan**

DSNG perlu mengembangkan analisis mengenai dampak keuangan dari risiko ESG, serta mengintegrasikan informasi ini ke dalam strategi dan pelaporan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

#### **3. Penguatan Tata Kelola dan Mekanisme Pengawasan**

Perusahaan disarankan untuk mengungkapkan lebih jelas mekanisme pengawasan, independensi dewan komisaris, serta pencegahan konflik kepentingan untuk meningkatkan kredibilitas tata kelola.

#### 4. Pelibatan Aktif Pemangku Kepentingan

DSNG sebaiknya memperkuat pelibatan pemangku kepentingan dengan menjelaskan mekanisme konsultasi, pengambilan keputusan bersama, dan transparansi dalam menanggapi aspirasi masyarakat lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2021). *Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*.
- DSNG. (2024). *Laporan keberlanjutan 2024*. <https://dsn.co.id/wp-content/uploads/2025/05/DSNG-Laporan-Keberlanjutan-24-ID-FinCir-13052025.pdf>
- Dwiyandi, N. (2025). Pengaruh Pengungkapan Terkait Keberlanjutan Dan Iklim Sesuai IFRS S1 dan S2 Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 12(1), 109–128. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.251105/jat.v12i1.22238>
- Ernawati, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 22(1), 45–57. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Gunawan, J., Permatasiri, P., & Sharma, U. (2022). *Exploring Sustainability And Green Banking Disclosures: A Study Of Banking Sector*. 24, 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10668-021-01901-3>
- IFC. (2021). Melampaui Neraca Keuangan Toolkit Pengungkapan dan Transparansi IFC. In *International Finance Corporation, World Bank Group*. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/beyond-the-balance-sheet-ifc-indonesian.pdf>
- ISSB. (2023). *IFRS S1 Sustainability Disclosure Standard General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards/ifrs-s1-general-requirements/>
- Komala, L. K., & Murtanto. (2024). Analysis Of Sustainability Report Standards And Adjustment Of IFRS S1 & IFRS S2 Standards Implementation. *IJAMESC*, 2(5), 1643–1657. <https://doi.org/https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i5.291>
- Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (M. H. Yuliatri Novita (ed.); Vol. 1). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. [https://www.researchgate.net/publication/359652702\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif/ink/6246f08b21077329f2e8330b/download?\\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/ink/6246f08b21077329f2e8330b/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19)
- Pedron, A. P. B., Macagnan, C. B., Simon, D. S., & Vancin, D. F. (2020). Environmental disclosure effects on returns and market value. *Springer Nature B.V. 2020*, 23(3), 4614–4633. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00790-2>
- POJK, Pub. L. No. 51/POJK.03/2017. [https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/peraturan-ojk/Documents/SAL\\_POJK\\_51\\_-\\_keuangan\\_berkelanjutan.pdf](https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/peraturan-ojk/Documents/SAL_POJK_51_-_keuangan_berkelanjutan.pdf)
- PwC. (2023). Sustainability Counts II : Situasi Pelaporan Keberlanjutan di Asia Pasifik. In *PwC Global*. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/esg/esg-asia-pacific/sustainability-counts-2023.html>
- Rahayu, P., & Dewi. (2021). *Pembuangan Limbah PT.INDOFOOD CBP IDOLAKTO diduga Cemari Lingkungan*. <https://radarinformasi.com/pembuangan-limbah-pt-indofood-cbp-idolakto-diduga-cemari-lingkungan/>
- SEOJK, Pub. L. No. 16 /SEOJK.04/2021. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik/SEOJK\\_-\\_16\\_-\\_2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik/SEOJK_-_16_-_2021.pdf)
- Shadra, M., & Hutapea, R. S. (2024). Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola

- (LST) dan Inovasi Hijau terhadap Nilai Perusahaan. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ialj.v5i1.5873>
- Simorangkir, R. R. J., & Shauki, E. R. (2024). Penerapan IFRS S1 dan S2 pada Sustainability Reporting PT PLN (Persero). *JURNAL AKUNTANSI*, 34(7), 1877–1894. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i07.p18>
- Sofia, A. (2024). Mengenal Konsep ESG: Pilar Penting Menuju Bisnis Berkelanjutan. *Spatial Research in Regional & Sustainable Economics Working Group Faculty of Economics & Business Universitas Gadjah Mada*. <https://sparse.feb.ugm.ac.id/mengenal-konsep-esg-pilar-penting-menuju-bisnis-berkelanjutan/%0A>
- Sun, Z. (2024). *Evaluation Singapore's Sustainability Reporting Alignment with the IFRS S1 Standards*. <https://doi.org/10.20944/preprints202409.0236.v1>
- Team, T. I. (2023). *Bahas IFRS S1 secara Detail, Mulai dari Latar Belakang hingga Persyaratannya*. <https://au-partners.com/id/blog/bahas-ifrs-s1-secara-detail-mulai-dari-latar-belakang-hingga-persyaratannya>
- Wijaya, A., & Novianto, R. A. (2024). Analisis Hubungan Kepatuhan Laporan Keberlanjutan terhadap Peraturan OJK dengan Kinerja Perusahaan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 4955–4965. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2464>